

ABSTRAK

Isni Nurul Insiyah: Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreng Tahun 2022

Saat ini, Indonesia adalah negara berkembang yang dinamis dan aktif dalam melaksanakan program pembangunan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, hukum dan pendidikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal dapat dimaksimalkan guna terpenuhinya kebutuhan pembiayaan dan pengeluaran daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, jalan, serta sarana dan prasarana yang semuanya bergantung pada penerimaan pajak. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang sangat penting sebagai salah satu sumber paling besar untuk pendapatan daerah. Salah satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang. Namun, pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah II Soreng belum berjalan secara optimal karena masih terus terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang masih menunggak dalam membayar pajak sehingga menjadi penghambat untuk Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah II Soreng dalam proses target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini menggunakan teori sistem pemungutan pajak oleh Adam Smith (1723-1790) dalam Waluyo (2017:13), terdiri dari asas persamaan (*equality*), asas kepastian hukum (*certainty*), asas kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*) dan asas ekonomi (*economics*). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan II Soreng masih belum optimal. Hal ini disebabkan dalam dimensi asas persamaan belum optimal dikarenakan masyarakat masih terbebani dengan besar pajak pembayaran dan kontribusi yang dilakukan masih belum terlaksana secara adil dan setara. Lalu pada dimensi asas kenyamanan pembayaran belum optimal dikarenakan masih terdapat kendala yang dirasakan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran secara *online*. Kemudian pada dimensi asas ekonomi belum optimal juga dikarenakan kepatuhan wajib pajak masih rendah sehingga setiap tahunnya data penunggakan selalu meningkat dan sanksi yang diberikan hanya membuat efek jera saja.

Kata kunci : Sistem Pemungutan Pajak, Pendapatan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

Isni Nurul Insiyah: Motor Vehicle Tax Collection System at the Bandung II Soreng Regency Regional Revenue Management Center in 2022

Currently, Indonesia is a dynamic developing country and is active in implementing development programs in various fields such as economic, social, legal and educational. Optimal Regional Original Income (PAD) can be maximized to meet regional financing and expenditure needs, including the development of infrastructure, roads and facilities and infrastructure, all of which depend on tax revenues. Motor Vehicle Tax is a very important regional tax as one of the largest sources of regional income. One of them comes from Motor Vehicle Tax which is managed by the Bandung II Soreang Regency Regional Revenue Management Center. However, the implementation of Motor Vehicle Tax collection at the Regional Revenue Management Center II Soreng has not been running optimally because there is still an increase in the number of taxpayers who are still in arrears in paying taxes, thus becoming an obstacle for the Regional Revenue Management Center II Soreang in the process of targeting Motor Vehicle Tax revenue.

This research uses the tax collection system theory by Adam Smith (1723-1790) in Waluyo (2017:13), consisting of the principle of equality, the principle of legal certainty, the principle of comfort of payment and the principle of economics (economics). The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature study

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the Motor Vehicle Tax collection system at the Soreang II Revenue Management Center is still not optimal. This is because in the dimension of the principle of equality it is not yet optimal because the community is still burdened with large tax payments and the contributions made are still not carried out fairly and equally. Then, in the basic dimension of payment convenience, it is not yet optimal because there are still obstacles felt by taxpayers in making online payments. Then, in the economic principle dimension, it is not yet optimal because taxpayer compliance is still low, so every year the data on arrears always increases and the sanctions given only have a deterrent effect.

Keywords: Tax Collection System, Regional Revenue, Motor Vehicle Tax.